

**KEBIJAKAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENJALIN
KEMITRAAN DENGAN DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI
UNTUK PENINGKATAN MUTU DI SMK MUHAMMADIYAH
KABUPATEN KEBUMEN**

*THE HEAD MASTER POLICY IN IMPROVING PARTNERSHIP THE BUSINESS
AND INDUSTRY WORLD TO QUALITY IMPROVEMENT IN MUHAMMADIYAH
VOCATIONAL HIGH SCHOOL KEBUMEN*



Disusun oleh :

Sumarjo
19.0406.0056

TESIS

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
Guna memperoleh gelar Magister Manajemen
Program Pendidikan Magister Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu jenjang pendidikan menengah Kejuruan dengan mempersiapkan lulusannya untuk siap kerja. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) diberi amanah oleh undang-undang untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap memasuki dunia kerja dan menjadi tenaga kerja yang produktif dan siap pakai, dalam arti langsung bisa bekerja di Dunia Usaha atau Dunia Industri. Dalam hal ini pendidikan kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai bidang jurusan yang ditekuninya. Pendidikan kejuruan mengutamakan pengembangan kemampuan peserta didik untuk dapat bekerja dalam bidang tertentu, kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja, melihat peluang kerja dan mengembangkan diri dikemudian hari. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut tentu siswa SMK harus memiliki kemampuan baik itu teori maupun praktik.

Tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan bergantung pada kebijaksanaan dan pengelolaan sekolah yang dilakukan kepala sekolah sebagai pemimpin. Kepala sekolah adalah seseorang yang bertugas untuk mengelola dan memberdayakan segala sumber daya yang terdapat di sekolah

dengan bekerja sama dengan seluruh perangkat sekolah dalam memberikan informasi pengetahuan kepada peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, dengan kata lain kepala sekolah adalah pejabat fungsional atau kepala atau pemimpin yang ada dalam organisasi sekolah. (Herawan, 2015:260).

Kepala sekolah sebagai pemimpin dalam organisasinya, dapat dikatakan sukses apabila visi, misi serta tujuan sekolah dapat tercapai, serta mampu menguasai peran dari kerjasama antara sekolah dan kerjasama dengan lembaga luar. Sehingga dapat digambarkan bahwa peranan kepala sekolah di dunia pendidikan yaitu mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu serta kualitas sekolah yang diduduki.

Seorang pimpinan terutama kepala sekolah harus mampu mengelola segala sumber daya yang terdapat di sekolah, memberikan arahan dan sekaligus mempengaruhi berbagai aktivitas yang memotivasi berkaitan dengan tugas dan kewajiban para tenaga kependidikan yang ada di bawahnya. Dengan adanya maksud dari penelitian ini, kemampuan mengelola, memajemen dan mengatur tersebut sangatlah diperlukan untuk pengembangan mutu sekolah. Maksudnya, bahwa kemampuan mengarahkan, mempengaruhi, mengelola, mengatur anggotanya berkaitan dengan bagaimana seorang kepala sekolah mampu menjalin budaya yang baik di sekolah dengan cara menanamkan nilai dan norma yang dikembangkan di

sekolah, tentunya tidak dapat dilepaskan dari keberadaan sekolah itu sendiri sebagai organisasi pendidikan, yang memiliki peran dan fungsi untuk berusaha mengembangkan, melestarikan, mewariskan norma-norma dan nilai-nilai budaya kepada para siswanya terutama dalam meningkatkan kualitas dan mutu sekolah (Sunhaji, 2014:145; Tilaar, 2002:18).

Sederhananya, kepala sekolah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadinya interaksi antara siswa dan guru dalam menerima pelajaran (Asrori, 2013:13). Sehingga dapat digambarkan bahwa peranan pemimpin di pendidikan adalah tugas seorang tenaga fungsional yaitu kepala sekolah dengan mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan dan meningkatkan mutu serta kualitas sekolah yang diduduki.

Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan untuk memperbaiki citra SMK melalui berbagai program, antara lain : pengembangan kapasitas kepala sekolah, pencitraan “SMK BISA” melalui massa media, membangun SMK menjadi Rintisan SMK Bertaraf Internasional, merupakan rasio SMK : SMA dari 30 : 70 menjadi 70 : 30. Pada tahun 2019 meluncurkan program SMK Revitalisasi dengan dana yang cukup besar. Kemudian pada tahun 2020 kembali diluncurkan program SMK *Center of Excellence* dengan anggaran yang lebih tinggi lagi. Program paling baru di tahun 2021 adalah lanjutan dari program COE yaitu program SMK Pusat Keunggulan. Usaha pemerintah

untuk meningkatkan mutu sekolah sungguh sudah mengalami kenaikan yang sangat bagus. Namun keefektifan dan hasil dari program – program tersebut masih dipertanyakan. Kebijakan kemitraan dalam lingkup pendidikan kejuruan seperti SMK melibatkan tiga komponen penting yaitu pihak majelis sekolah, pihak dunia usaha industri dan pihak sekolah menengah kejuruan. Melalui mekanisme pendidikan sistem ganda seperti pelaksanaan praktek kerja industri di dunia usaha dan industri, ketiga komponen penting di sekolah diharapkan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Mutu pendidikan merupakan masalah yang dijadikan agenda utama untuk diatasi dalam kebijakan pembangunan pendidikan, karena hanya dengan pendidikan yang bermutu akan diperoleh lulusan yang bermutu dan mampu membangun diri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Standar Nasional Pendidikan merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, telah menggariskan ketentuan umum bagi satuan pendidikan formal agar dapat memenuhi mutu pendidikan (Tilaar, 2006:10). Pendidikan yang bermutu akan tercapai, apabila didukung oleh seluruh perangkat dan komponen yang ada dalam lembaga pendidikan yang terorganisir dengan baik. Komponen tersebut adalah proses, *output*, *input*, guru, sarana, prasarana, biaya, semuanya yang perlu mendapatkan dukungan sepenuhnya dari pihak yang mempunyai peran penting dalam lembaga pendidikan, dukungan tersebut muncul dari kepala sekolah. Kepala sekolah adalah pemimpin di lembaga pendidikan yang berhubungan langsung dengan

pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Sebagai pemangku kebijakan di sekolah, kepala sekolah harus menfungsikan perannya secara maksimal dan mampu memimpin sekolah dengan bijak dan terarah, serta mengarah kepada pencapaian tujuan yang maksimal pula, demi meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan (Juliantoro, 2017:27).

Indonesia membutuhkan peningkatan mutu pendidikan dikarenakan hal tersebut akan mempengaruhi dari kualitas sumber daya manusia yang ada. Sekolah sebagai jembatan antara orang tua dan pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas sumber daya manusia. Salah satu hal yang dapat dilakukan agar sekolah menjadi salah satu tempat yang aktif mengamalkan tugasnya adalah melalui suatu kemitraan atau kerjasama pendidikan dengan pihak luar sekolah.

Kerjasama pendidikan kejuruan (SMK) dengan dunia usaha dan industri menjadi kunci keberhasilan pendidikan kejuruan, dimana pendidikan dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi bersama. Sehingga kompetensi kelulusan siswa dengan tuntutan dunia kerja seimbang dan meningkat. Disamping itu, pendidikan kejuruan akan dilirik oleh masyarakat sebagai bukti relevansinya pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

Pihak sekolah dengan dunia usaha dan industri harus dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Wujud kerjasama antara dunia pendidikan dengan potensi dan sumberdaya yang dimiliki di sekitar sekolah. Sekolah dengan dunia usaha/ industri bisa membuat semacam perjanjian kesepahaman

dalam hal penyerapan tenaga kerja dari sumber daya yang telah disediakan oleh sekolah kejuruan.

Kerjasama dunia pendidikan dengan dunia usaha dan industri menjadi kunci keberhasilan pendidikan kejuruan, dimana pendidikan dirancang, dilaksanakan dan dievaluasi bersama. Sehingga kompetensi kelulusan siswa dengan tuntutan dunia kerja seimbang dan meningkat. Disamping itu, pendidikan kejuruan akan dilirik oleh masyarakat sebagai bukti relevansinya pendidikan dengan dunia usaha dan industri.

Kepala sekolah Muhammadiyah sebagai pengelola lembaga pendidikan Muhammadiyah memberikan ketetapan dalam rangka peningkatan kualitas dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merealisasikan program pemerintah. Salah satu program pemerintah untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang dapat memberikan bekal ketrampilan sesuai dengan bidang keahliannya. Cara yang dilakukan salah satunya adalah dengan menjalin kerjasama kemitraan dengan DU-DI.

Pada era global dan persaingan bebas, setiap sekolah berusaha memenangkan persaingan. Kepala sekolah SMK dituntut untuk berperan dan bertindak kreatif dan inovatif dalam mengkomunikasikan keunggulan sekolah kepada industri, sehingga industri memiliki kemauan mendukung program – program pendidikan SMK terutama untuk SMK Muhammadiyah yang berada di Kabupaten Kebumen. Ada 7 SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, beberapa diantaranya adalah SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK

Muhammadiyah Petanahan dan SMK Muhammadiyah Rowokele. Ketiga SMK ini memiliki latar belakang perkembangan yang berbeda-beda. Sehingga ketiga SMK Muhammadiyah ini peneliti gunakan sebagai sampel dari objek penelitian ini.

Dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, maka perlu peran khususnya kepala SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dalam mengembangkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri untuk dapat bersama-sama mengembangkan pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan agar tujuan DUDI dan lembaga pendidikan khususnya SMK Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Kebumen dapat tercapai dan selaras. Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan DUDI dalam mengembangkan serta menyelaraskan tujuan tersebut adalah menyelaraskan dan mengembangkan komunikasi yang berkelanjutan terhadap kondisi dan perkembangan industri serta kebutuhan kompetensi industri. Ini dimaksudkan agar dapat diselaraskan dengan program pendidikan pada sekolah menengah kejuruan (SMK) Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Kebumen, sehingga siswa memperoleh bekal yang cukup dan memadai untuk dapat bersaing pada dunia kerja. Selain itu juga, DUDI mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan. Sementara itu banyak kepala sekolah SMK Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Kebumen sebagai penentu kebijakan

di lembaga pendidikan belum optimal dalam menjalankan kerjasama kemitraan dengan DUDI sehingga tujuan pendidikan dan DUDI tidak tercapai.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti mengambil beberapa objek penelitian yaitu beberapa SMK Muhammadiyah yang ada di Kabupaten Kebumen, diantaranya adalah SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK Muhammadiyah Petanahan, dan SMK Muhammadiyah Rowokele. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan apa saja yang dilakukan oleh Kepala SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK Muhammadiyah Petanahan, dan SMK Muhammadiyah Rowokele dalam mengembangkan mutu pendidikan melalui kerjasama dengan dunia usaha dan industri di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), maka dilakukan sebuah Penelitian dengan judul; Kebijakan Kepala Sekolah Dalam Menjalin Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri untuk Peningkatan Mutu di SMK Muhammadiyah Kabupaten Kebumen. Penelitian ini memunculkan rumusan masalah sebagai berikut; 1) Bagaimana kebijakan *link and match* dengan DUDI di SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK Muhammadiyah Petanahan dan SMK Muhammadiyah Rowokele ? 2) Bagaimana bentuk kemitraan yang diambil oleh kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI ? dan 3) Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan *link and match* dengan DUDI di SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK Muhammadiyah Petanahan dan SMK Muhammadiyah Rowokele ?
2. Bagaimana bentuk kemitraan yang diambil oleh kepala sekolah dengan DUDI ?
3. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan *link and match* yang diberlakukan oleh kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI
2. Untuk mendeskripsikan jaringan Kemitraan di SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen
3. Untuk mendeskripsikan faktor – faktor yang menjadi penghambat dan pendukung pelaksanaan kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak terkait, ada 2 (dua) manfaat yang diharapkan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep – konsep, dan teori - teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan :

- a. Dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI
- b. Dapat menjadi bahan diskusi dalam perkuliahan terkait kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI

2. Manfaat Praktis

Dilihat dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat member manfaat bagi :

- a. Praktisi Pendidikan Kejuruan agar selaras dengan *link and super mach* dengan kebutuhan masyarakat.
- b. DUDI dapat memberikan informasi tentang kemitraan yang bisa diterapkan oleh pendidikan

- c. Kepala sekolah dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam mengembangkan teori mengenai kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan bagi peningkatan mutu di Sekolah Menengah Kejuruan.
- d. Bagi pihak lain dapat memberi kontribusi yang positif dan juga dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian dalam bidang yang sama.
- e. Bagi peneliti maupun peneliti selanjutnya, yaitu menambah wawasan terhadap penelitian tentang kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan dengan DUDI.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebijakan Kepala Sekolah

a. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan organisasi yang bersangkutan. Keputusan di sini adalah memutuskan untuk “tidak memutuskan” atau “tidak mengurus isu terkait” (Tilaar, 2014 : 184)

Menurut Hasbullah (2016 : 63) kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, menyahuti berbagai kepentingan dan meminimalkan adanya kerugian pihak – pihak tertentu. Haroll Laswell dan Abraham Kaplan dalam (Nugroho, 2008 : 53) yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan – tujuan tertentu, nilai – nilai tertentu, dan praktik – praktik tertentu (*a projected program of goals, values, and practices*). Selanjutnya Carl I. Friedrich dalam (Nugroho, 2008 : 53) mendefinisikannya sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada. Kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi

sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pengertian berikutnya dikemukakan oleh Hasbullah (2016 : 37) bahwa kebijakan lebih berat penekanannya pada tindakan (produk) yaitu kebijakan yang ditetapkan secara subjektif. Dalam pengertian operatifnya, kebijakan dapat diartikan sebagai : 1) suatu penggarisan ketentuan – ketentuan, 2) yang bersifat sebagai pedoman, pegangan dan bimbingan untuk mencapai kesepakatan dalam maksud, cara dan sarana, 3) Bagi setiap usaha dan kegiatan sekelompok manusia yang berorganisasi, 4) sehingga terjadi dinamisasi gerak tindak yang terpadu, sehaluan dan seirama mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat 3 elemen yaitu : identifikasi dari suatu tujuan yang ingin memuat, taktik atau suatu strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan penyediaan berbagai *input* untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, kebijakan menurut peneliti adalah suatu ketetapan yang dikeluarkan oleh kepala sekolah dalam upaya peningkatan semua komponen yang terdapat di dalam sekolah khususnya sumber daya manusia yaitu *output* siswa yang telah menempuh pendidikan dalam sebuah lembaga pendidikan SMK Muhammadiyah Kabupaten Kebumen.

b. Kepala Sekolah

Kepala Sekolah adalah pemimpin terpenting dan paling berperan untuk meningkatkan kualitas sekolah. Sejalan dengan semakin kompleknya tuntutan tugas kepala sekolah yang menghendaki dukungan kinerja yang efektif dan efisien, kepala sekolah harus bisa mereposisi diri. Kompri (2017 : 53-54) berpendapat dalam satuan pendidikan, kepala sekolah menduduki dua jabatan penting untuk bisa menjamin kelangsungan proses pendidikan sebagaimana yang telah digariskan oleh perundang –undangan. Pertama, kepala sekolah adalah pemimpin formal pendidikan di sekolahnya. Sebagai pengelola pendidikan , berarti kepala sekolah bertanggungjawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan cara melaksanakan administrasi sekolah dengan seluruh substansinya. Di samping itu kepala sekolah bertanggungjawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada agar mereka mampu menjalankan tugas pendidikan. Sebagai seorang pejabat formal , kepala sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap atasan, sesama rekan kepala sekolah atau lingkungan terkait, dan kepada bawahan.

Sagala (2017 : 88) mengemukakan bahwa tugas utama yang diemban oleh kepala sekolah sebagai seorang pemimpin adalah merumuskan berbagai bentuk kebijakan yang berhubungan dengan visi, orientasi dan strategi pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisien. Kepala sekolah

juga bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, baik fungsi yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya kemitraan secara efektif dan efisien. Kepala sekolah dikatakan berhasil apabila memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.

Berdasarkan uraian di atas, kebijakan kepala sekolah adalah hasil strategi dan taktik yang dibuat secara arif dan bijaksana oleh kepala sekolah untuk seseorang / sekelompok orang untuk diarahkan dalam rangka mencapai tujuan.

a. Fungsi Kebijakan Kepala Sekolah

Kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan atau melaksanakan program dan kegiatan, adapun fungsi dari kebijakan itu sendiri yaitu :

- 1) Memberikan petunjuk, rambu dan signal penting dalam menyusun program kegiatan.
- 2) Memberikan informasi mengenai strategi yang akan dilaksanakan
- 3) Memberikan arahan kepada pelaksana
- 4) Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai visi, misi, sasaran dan tujuan.
- 5) Menyelenggarakan pengelolaan urusan tata usaha.

Menurut Pongtuluran (1995 : 7) fungsi kebijakan dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Pedoman untuk bertindak. Hal ini mengungkapkan bahwa kebijakan pendidikan mempunyai posisi yang sentral dalam menentukan suatu acuan dalam implementasi program pendidikan serta sebagai tuntutan ke mana arah sistem pendidikan akan tertuju dan berjalan.
- 2) Pembatas perilaku. Apabila dikaitkan dengan pendidikan kebijakan pendidikan tidak dapat dilepas dari norma serta aturan dalam setiap tindakan yang diaktualisasikan berkaitan dengan aktivitas pendidikan.
- 3) Bantuan bagi pengambil keputusan. Kebijakan pendidikan di sini adalah sebagai ujung tombak dalam mengambil keputusan yang tepat dan benar setelah melalui serangkaian proses perumusan oleh para pembuat kebijakan pendidikan.

Agar kepala sekolah mampu bergerak dari pemimpin level bawah sampai level yang lebih tinggi dibutuhkan empat unsur yaitu :

- 1) Kepala Sekolah harus memiliki visi yang baik dan terbuka agar mampu menerima berbagai hal yang baru, walaupun mungkin bertentangan dengan apa yang diyakininya.

- 2) Unsur keberanian, kepala sekolah yang mencintai pekerjaannya akan memiliki keberanian yang tinggi dan berani mengambil resiko.
- 3) Kemampuan untuk bekerja dalam alam yang realistis, harus dapat membedakan mana opini dan mana fakta.
- 4) Harus memiliki kemampuan menjadi pemimpin, tidak sekedar pemimpin legalitas, adalah memiliki kepedulian dan sensitivitas yang tinggi tetapi mengedepankan nilai – nilai luhur, cinta , kasih sayang dan integritas, komitmen dalam memimpin agar memperoleh kepercayaan.

Sedangkan fungsi analisis kebijakan menurut Fattah (2014 : 12) *Pertama*, fungsi alokasi yang menekankan fungsi analisis kebijakan dalam penentuan agenda analisis kebijakan (*agenda setting mechanism*). *Kedua*, fungsi ingkuri yang menekankan pada fungsi analisis kebijakan dalam dimensi rasional dalam rangka menghasilkan informasi teknis yang berguna sebagai masukan bagi proses pembuatan keputusan pendidikan. *Ketiga*, fungsi komunikasi yaitu cara – cara atau prosedur yang efisien dalam rangka memasarkan hasil – hasil analisis kebijakan sehingga memiliki dampak yang berarti bagi proses pembuatan keputusan. Ketiga fungsi tersebut memiliki berbagai kepentingan yang berbeda.

2. Kemitraan

a. Pengertian Kemitraan

Menurut Rukmana (2006 : 60) Kemitraan mengandung beberapa pengertian :

- 1) Kerjasama, yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi keinginan pihak lain;
- 2) Keteguhan, yaitu derajat upaya sesuatu pihak untuk memenuhi keinginan sendiri;
- 3) Kolaborasi, yaitu situasi dimana masing – masing pihak ingin memenuhi sepenuhnya kepentingan semua pihak;
- 4) Kompromi, adalah situasi dimana masing – masing pihak bersedia mengorbankan sesuatu sehingga terjadi pembagian beban dan manfaat.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan kemitraan antara DUDI dengan sekolah kejuruan, banyak kegiatan kemitraan yang dapat dikembangkan oleh program tersebut, diantaranya :

- 1) Pengelolaan program kegiatan bersama antara penyelenggara pendidikan dengan lembaga mitra,
- 2) Pemanfaatan sarana prasarana yang dimiliki oleh lembaga yang bermitra,
- 3) Program pendanaan guna mewujudkan sebuah program yang akan dilakukan,

- 4) Pendayagunaan / penempatan lulusan dari institusi pendidikan ke sektor kerja atau komoditas yang dibutuhkan oleh lembaga yang menjadi mitra.

Menurut Mulyasa (2012 : 148) tujuan membangun hubungan dan kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat dilihat dari dua dimensi, yaitu dimensi kepentingan sekolah yang meliputi memelihara kelangsungan hidup sekolah, meningkatkan mutu pendidikan, memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan memperoleh bantuan serta dukungan dari masyarakat dalam rangka pengembangan program – program sekolah; dan dimensi kebutuhan masyarakat dengan tujuan pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat. Maksudnya adalah memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh kemajuan sekolah dalam memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat, menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat, dan memperoleh anggota masyarakat yang terampil serta meningkatkan kemampuannya.

Sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang melaksanakan tugas pendidikan tentunya dapat membangun kerjasama atau kemitraan dengan lembaga – lembaga lain dalam masyarakat. Menurut Kuncoro (2010 : 4) kemitraan sekolah dengan lembaga lain dalam masyarakat bertujuan :

- 1) Membantu sekolah dalam melaksanakan tugas pendidikan,
- 2) Memperkaya pengalaman belajar yang diperoleh siswa dalam bermacam – macam setting kehidupan,
- 3) Mendekatkan kegiatan belajar siswa dengan konteks yang riil di dalam kehidupan sehari – hari,
- 4) Membantu sekolah untuk memanfaatkan sumber – sumber yang tersedia di masyarakat bagi kegiatan pendidikan,
- 5) Meningkatkan berkembangnya kemandirian, kreatifitas, sikap toleransi dan keterbukaan para siswa dalam kehidupan belajar,
- 6) Meningkatkan kebermaknaan kegiatan belajar siswa bagi perubahan kehidupan dan pemecahan masalah social.

b. Faktor yang mempengaruhi kemitraan

Faktor yang mempengaruhi kemitraan menurut Glover dan Kusterer (1990 :1) adanya jaminan pemasaran, 2) kepastian harga, 3) adanya transfer teknologi, 4) penyediaan sarana produksi, 5) terbukanya akses modal, dan 6) penyuluhan langsung dari perusahaan mitra. Sementara itu Soetomo (2009 : 38) menyebutkan faktor yang mempengaruhi kemitraan adaah :

1) *Networking*

Networking atau jaringan merupakan suatu kombinasi kegiatan – kegiatan yang saling berkaitan, yang harus dilakukan dalam

urutan tertentu sebelum keseluruhan tugas dapat diselesaikan. Urutan – urutan kegiatan tersebut dilakukan secara logis, yaitu mulai dari pelaksanaan pembinaan sampai dengan kegiatan lainnya terselesaikan.

2) *Cooperation*

Cooperation adalah poin penting dalam menjalankan sebuah partnership atau kemitraan. Hal ini dikarenakan, dengan adanya jalinan kemitraan, maka tujuan dari masing – masing lembaga akan tercapai dengan mudah.

3) *Coordination*

Proses dan upaya perubahan menuju kondisi yang semakin sejahtera merupakan realitas yang selalu dijumpai dalam kehidupan masyarakat. Realitas itu apabila dicermati mengandung beberapa unsur dasar. Beberapa unsur dasar tersebut apabila direkonstruksi akan menjadi sosok yang utuh yang menggambarkan realitas tersebut. Sosok dari realitas tersebut adalah proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi semakin terwujudnya hubungan yang serasi antara *needs* dan *resources* melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengembangkan dirinya terutama dalam memanfaatkan peluang dan sumber daya, mengantisipasi

tantangan dan menangani masalah sosial yang muncul, sehingga terwujud kondisi kehidupan yang semakin sejahtera.

4) *Trust*

Dalam kemitraan, syarat utamanya adalah bahwa masyarakat harus memiliki sifat yang mengakar, dan untuk pihak lain harus responsive dan adaptif terhadap pembaharuan yang sedang berjalan. Sifat mengakar apabila institusi tersebut diakui, dihargai, dirasakan manfaatnya dan dijadikan orientasi dalam tindakan bersama.

5) *Capability*

Capability atau kemampuan untuk melakukan partnership sehingga bisa didapatkan keuntungan ataupun kerugian.

Di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2009 : 64) disebutkan bahwa indikator keberhasilan sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri ditunjukkan : a) terbentuknya tim kerja kehumasan yang mampu menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan industri, b) terlaksananya penjajagan kerjasama dengan mitra yang terkait untuk memperoleh masukan sebelum pelaksanaan program, c) terealisasinya kontrak kerjasama yang dituangkan dalam nota kesepahaman dengan pihak yang dijadikan mitra, dan d)

terrealisasinya berbagai kegiatan dalam kerangka mensukseskan pelaksanaan program seperti pertukaran pelajar, guru, kepala sekolah, serta pemagangan dalam upaya penambahan wawasan serta kompetensi.

3. Mutu

a. Pengertian Mutu

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dikutip oleh Onisimus Amtu, dijelaskan arti dari mutu adalah “ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat berupa; kepandaian kecerdasan, kecakapan, dan sebagainya (amtu,118)

Secara istilah mutu merupakan sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk memperbaiki keluaran atau *output* yang dihasilkan. (Arcaro, 2005:75). Dari sini dapat kita pahami bahwa mutu merupakan upaya perbaikan lembaga atau institusi berdasarkan kecakapan atau kemampuan yang dimilikinya.

Selain itu, juga terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang definisi mutu ini. Menurut Philip B. Crosby, mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Secara sederhana sebuah produk dikatakan berkualitas/ bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, yang meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. (Rohmah,dkk, 2017:205)

Sebuah produk dikatakan bermutu jika produk tersebut sesuai dengan kebutuhan konsumen atau pelanggan, sehingga dapat memberikan kepuasan dari pelanggan terhadap produk tersebut.

Sedangkan menurut Joseph Juran, mutu adalah kemampuan untuk digunakan atau *quality is fitness for use*. (Suyadi, 2004:5) Sehingga dapat diartikan bahwa mutu merupakan suatu kesesuaian atau kenyamanan suatu barang digunakan oleh seseorang. Selain itu indikasi dari barang yang bermutu adalah yang memiliki kekuatan, kehandalan, dan jaminan untuk digunakan.

Dalam hal ini, Sallis juga menjelaskan bahwa mutu adalah sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan atau kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. (Amtu, 118) mutu dipandang sebagai sesuatu yang paling integral dalam pemenuhan kebutuhan seseorang.

Terdapat banyak sekali perbedaan pendapat mengenai definisi mutu. Hal tersebut dikarenakan konsep mutu atau kualitas sangat relatif dan bergantung pada sudut pandang setiap orang. Di antara para pakar mutu masih terdapat perbedaan pandangan, sekalipun pada segi-segi tertentu terdapat persamaan di antara mereka, namun semuanya menekankan pada bagaimana meningkatkan kualitas baik pada produk barang maupun layanan jasa melalui standarisasi yang telah ditetapkan, melalui manajemen yang profesional dan berkesinambungan.

Dari berbagai pendapat atau pandangan para ahli tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mutu adalah sesuatu yang sesuai dengan standar atau persyaratan yang dapat dimanfaatkan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan atau memberikan kepuasan pelanggan yang diperoleh melalui manajemen yang baik dan berkelanjutan.

Di dalam pendidikan, mutu adalah bagian penting yang harus diperhatikan dan terus ditingkatkan. Mutu sekolah yang baik akan cenderung menghasilkan siswa yang bermutu. Lebih jauh lagi, produk sekolah yang bermutu memberi dampak positif terhadap kondisi perekonomian suatu daerah, bahkan negara. Manajemen mutu juga merupakan suatu cara yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif suatu organisasi dan mutu dipertimbangkan sebagai suatu kebijakan pemasaran yang efektif.

4. Hubungan Kemitraan dengan Peningkatan Mutu

Jalinan kemitraan yang bagus antara sekolah dan dunia usaha dan industri akan sangat berdampak pada peningkatan mutu. Jika kerjasama antara sekolah dengan dunia usaha dan industri semakin baik, link and match, maka mutu sekolah pasti akan meningkat. Hal ini disebabkan standar industri sudah bisa diterapkan di sekolah. Standar industry tentukan bukan asal – asalan, namun sudah diperhitungkan dengan

standart kemanan dan standar mutu yang diawasi oleh badan standart mutu.

5. Nilai Keislaman dalam Kebijakan Kepala Sekolah

Jika sekolah menerapkan standar mutu yang sesuai dengan industri, akan memberikan jaminan keamanan bagi siswanya. Hal ini sesuai dengan tujuan beragama islam yaitu melindungi diri (manusia). Penerapan standar keselamatan kerja akan melindungi siswa dari kecelakaan kerja yang bisa berakibat pada cacat bahkan kematian.

Nilai keislaman lainnya adalah disiplin dan kerja keras. Islam sangat menganjurkan kedua hal tersebut karena begitu pentingnya sifat disiplin dan kerja keras. Disiplin akan sangat membantu target mudah tercapai dan tidak meleset dari perhitungan. Sedangkan kerja keras merupakan semangat untuk berusaha lebih baik.

Nilai keislaman selanjutnya adalah menjaga amanah. Perjanjian kerja sama dengan industri harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi. Jangan sampai kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan tidak dilaksanakan dengan baik. Jika MoU dengan industri dilanggar atau dikhianati, maka perusahaan akan menghentikan kerjasama dan akan menggandeng sekolah lain yang bisa dipercaya.

Maka, sudah selayaknya kebijakan kepala sekolah yang diambil tidak boleh bertentangan dengan nilai keislaman yang sudah disebutkan di atas.

Kepala sekolah Muhammadiyah harus menjunjung tinggi nilai – nilai islam agar visi dan misi sekolah bisa terwujud.

B. Kajian Penelitian yang Relevan

Beberapa penelitian serupa yang sudah dilakukan diantaranya :

- 1) Khasanah, Mahasiswa Managemen Pendidikan Islam angkatan 2017 menulis tesis dengan judul “Kebijakan Kepala Sekolah dalam Menjalin Kemitraan bagi Peningkatan Mutu di SMK Swasta Kabupaten Magelang”. Dalam penelitiannya beliau menyimpulkan bahwa kemitraan yang terjalin antara Kepala Sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri dari segi input, proses dan output sudah berhasil, meskipun kemitraan dari segi outcome dapat dikatakan belum berhasil. Hal ini mengandung implikasi bahwa kepala sekolah harus dapat membuat kebijakan yang bisa diterapkan terkait dengan kemitraan sehingga sekolah akan bermutu, disamping itu hubungan antara sekolah dengan dunia usaha dan industri bisa tertata, terprogram dan memuaskan berbagai pihak. Dengan kebijakan kepala sekolah dalam menjalin kemitraan yang melibatkan berbagai pihak, maka diharapkan jalinan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri akan dapat meningkatkan mutu SMK.
- 2) Alif Sukma Prasetyo dan Nunuk Hariyati dari Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Univetsitas Negeri Surabaya menulis jurnal dengan judul “Strategi Kepala Sekolah Membangun Kemitraan

Dengan Dunia Usaha / Dunia Industri Dalam Peningkatan Keterserapan Lulusan Siswa Smk”. Jurnal tersebut menyimpulkan bahwa strategi kepala sekolah dalam usaha meningkatkan keterserapan lulusan SMK diantaranya melalui jalinan kemitraan dalam bentuk program praktek kerja lapangan, penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan DU/DI, dan penyaluran lulusan sekolah sesuai dengan keterampilan siswa untuk mencapai keterserapan secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah.

- 3) Bambang Ixtiarto dan Budi Sutrisno dalam jurnalnya Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri (Kajian Aspek Pengelolaan Pada Smk Muhammadiyah 2 Wuryantoro Kabupaten Wonogiri) menyimpulkan bahwa :

Pengelolaan kemitraan di SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro yang dilakukan untuk mengelola potensi sekolah dalam mendukung kerjasama dengan Du/Di : a) Pembentukan panitia/ pembagian kelompok kerja (Pokja) yang menangani pelaksanaan kerja sama dengan Du/Di, b) Sekolah pro aktif menjalin komunikasi dengan Du/Di dalam mempromosikan keberadaan sekolah, c) Sekolah mengajukan penawaran proposal ke industri terkait dengan kerjasama sekolah yang meliputi (sinkronisasi kurikulum, kegiatan praktik kerja industry, penempatan tamatan, OJT guru), d) Memanfaatkan peran – peran tertentu Du/Di sebagai guru tamu, kunjungan industri, e) Du/Di

yang bekerjasama dituangkan dalam bentuk naskah kerjasama atau MoU. 2. Pelaksanaan kemitraan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro dengan dunia usaha dan dunia industri dilakukan melalui MoU, yang isinya sesuai bidang kerjasama yang disepakati antara lain sinkronisasi kurikulum, kunjungan industri, guru tamu, prakerin, uji kompetensi kejuruan (UKK), OJT guru, sertifikasi, bantuan peralatan praktek, pendanaan sekolah, beasiswa dari industri, dan recruitment/penempatan kerja bagi tamatan. Hasil kemitraan masih kurang optimal, sehingga penempatan lulusan dalam bekerja belum sesuai dengan kompetensi yang dimiliki peserta didik 3. Pengendalian Pelaksanaan Program Kemitraan SMK Muhammadiyah 2 Wuryantoro Dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri, dengan mempekerjakan dan melakukan peningkatan pelatihan peserta didik SMK oleh mitra atau Du/ Di di perusahaan atau industri yang ada di sekitarnya sesuai dengan kompetensi keahlian dari masing-masing siswa.

Dari beberapa penelitian terdahulu, penulis dapat mengambil fokus penelitian pada Kebijakan Kepala Sekolah yang diambil dalam rangka peningkatan mutu SMK Muhammadiyah Kabupaten Kebumen.

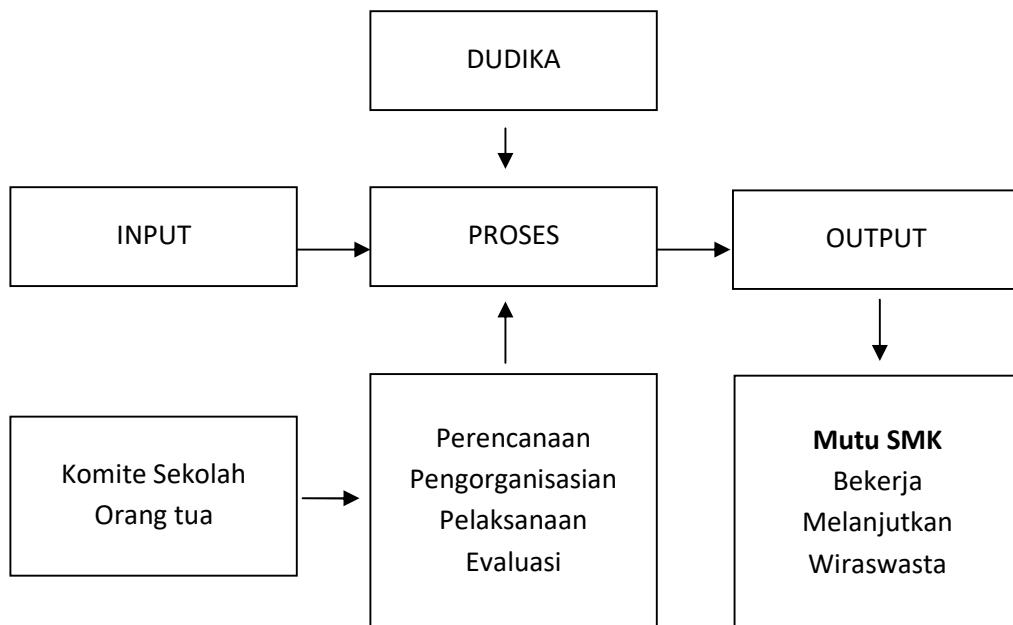
C. Kerangka Pemikiran dan Pendekatan

Pendidikan kejuruan kerjasama yang dibangun dengan dunia industri merupakan suatu hal yang sangat tepat khususnya dalam mengembangkan resources. Adanya kerjasama antara pendidikan kejuruan dan industri

diharapkan terdapat pemanfaatan fasilitas. Kerjasama yang dibangun adalah antara sekolah kejuruan dengan industri , oleh karenanya kedua belah pihak harus dapat bersinergi dalam mencapai tujuan bersama. Bentuk pendekatan yang bisa dilakukan antara dunia pendidikan kejuruan dengan dunia industri berupa pendekatan kerjasama kemitraan. Sedangkan bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan industri dapat dikembangkan melalui lingkungan sekolah dalam rangka memanfaatkan dan memberdayakan semua potensi dan sumberdaya yang dimiliki.

D. Alur Pikir

Berikut kerangka berfikir yang dijabarkan dalam beberapa hal di bawah ini :



Gambar : 1

Kerangka berfikir

Berdasarkan gambar tersebut di atas, manajemen yang baik bergantung dari input dan proses yang baik, demikian juga input pada SMK yang meliputi kepala sekolah, guru, staf tata usaha, siswa dan sarana prasarana serta komite sekolah. Pada kemitraan SMK dengan DUDI, ada beberapa proses yang harus dilakukan diantaranya yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi. Ketika proses berlangsung terdapat beberapa faktor pendukung yaitu komite sekolah, orang tua dan partisipasi masyarakat.

Selain itu ada juga faktor penghambatnya yaitu : anak didik, pendidik, dana dan sarana prasarana serta partisipasi masyarakat. Setelah melaksanakan beberapa tahap dari proses di atas diharapkan dapat menghasilkan *output* yang baik yang dapat dilihat dari prestasi yang diperoleh SMK.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk memahami fenomena sosial dari pandangan pelakunya (Sarjono, 2008 : 23). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang pengumpulan datanya dilakukan di lapangan, seperti di lingkungan masyarakat, lembaga – lembaga dan organisasi pemerintah.

Ciri – ciri penelitian kualitatif menurut Moleong (2017 : 8) yaitu : 1) Latar alamiah atau pada konteks dari suatu keutuhan (*entility*). Hal ini dilakukan menurut Lincoln dan Guba (1985 : 39), karena industri alamiah menghendaki adanya kenyataan – kenyataan sebagai keutuhan yang tidak dapat dipahami jika tidak dipisahkan dari konteksnya. 2) Manusia sebagai alat (*instrument*) yaitu peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan pengumpul data utama. 3) Metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara dan penelaahan dokumen. 4) Analisis data secara induktif dengan alasan proses induktif lebih dapat menemukan kenyataan – kenyataan jamak sebagaimana terdapat dalam data, analisis induktif lebih dapat membuat hubungan peneliti dengan responden menjadi eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel, lebih dapat menguraikan secara penuh dan dapat membuat

keputusan – keputusan tentang dapat tidaknya pengalihan pada suatu latar lainnya. Analisis induktif lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan – hubungan , dan dapat memperhitungkan nilai – nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik. 5) Teori dari dasar (*grounded theory*) yaitu penelitian yang lebih mendekati kearah bimbingan penyusunan teori substantif yang berasal dari data. 6) Deskriptif yaitu pengumpulan data berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. 7) Lebih mementingkan proses dari pada hasil. 8) Adanya batas yang ditentukan oleh fokus yaitu atas dasar fokus yang timbul sebagai masalah dalam penelitian. 9) Adanya kriteria khusus untuk keabsahan yaitu mendefnisikan validitas, reliabilitas, dan objectifitas dalam versi lain. 10) Desain yang bersifat sementara yaitu dengan menyusun desain secara terus menerus yang disesuaikan dengan kenyataan di lapangan. 11) Hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama yaitu penelitian yang lebih menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data.

B. Tempat dan waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tiga SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen yaitu SMK Muhammadiyah Kutowinangun, SMK Muhammadiyah Petanahan dan SMK Muhammadiyah Rowokele.

Pengambilan subjek penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Pemilihan objek yang dimaksud dengan alasan karena sekolah tersebut untuk bersaing dengan sekolah lain membutuhkan kekuatan lebih berupa dukungan dari dalam dan luar, ada perbedaan yang mencolok walaupun sekolah tersebut dinaungi oleh yayasan yang sama.

Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya ijin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan. 1 bulan untuk penelitian dan setengah bulan untuk pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk tesis dan proses bimbingan berlangsung.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan dokumen sekolah dengan sumber data yang langsung memberikan data. Subjek sumber data primer adalah warga sekolah yang meliputi : kepala sekolah, guru (waka humas, kaprodi, karyawan). Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini.

Sumber data primer dan sekunder ini peneliti gunakan untuk mempermudah dalam mengumpulkan data – data dan menganalisis hasil dari penelitian ini. Harapannya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data untuk memperoleh kelengkapan data yang tepat dan valid dalam penelitian ini, antara lain :

1. Wawancara (*interview*)

Interview dapat dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan Tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian (Hadi , 2002 : 193). Dengan metode ini penulis akan berwawancara langsung dengan Kepala Sekolah karena kepala sekolah sebagai penentu kebijakan, Ketua Program Studi (kaprodi) karena bertanggungjawab dalam memetakan industri kemitraan yang relevan, wakil kepala bidang humas/ industri yang membantu pelaksanaan program kepala sekolah, dan DUDI sebagai mitra.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan menyelidiki benda – benda tertulis seperti : buku, majalah, dokumentasi, peraturan peraturan, catatan harian dan sebagainya (Hadi, 2002 : 71). Di dalam

penelitian ini peneliti mengumpulkan data – data otentik yang lebih terjamin kebenarannya melalui pencatatan, pengkopian dokumen dokumen penting sebagai penunjang penelitian, seperti surat – surat, sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, struktur sekolah, data guru dan karyawan, data siswa dan prestasi siswa, surat rekomendasi, sarana dan prasarana. Juga laporan – laporan program kegiatan lainnya atau tugas – tugas personal sekolah.

3. Observasi

Pengamatan yang dilakukan yakni pengamatan langsung. Adapun data yang dihimpun dalam pengamatan ini adalah keberadaan sarana dan prasarana sekolah. Dalam pengamatan ini, peneliti menggunakan : (1) catatan – catatan, (2) android (3) memusatkan pengamatan pada data – data yang relevan, (4) menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati, dan (5) mengklarifikasi data hasil pengamatan terhadap informan.

E. Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada peneliti kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007 : 320).

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah yang dilakukan benar – benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility, transferability, dependability, dan confirmability* (Sugiyono, 2007 : 270)

Dalam mengetahui keabsahan data yang diperoleh dari penelitian maka dilakukan dengan memakai keabsahan data internal, yakni dengan menggunakan triangulasi teknik dan triangulasi sumber (Sugiyono, 2016). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan cara yang berbeda. Triangulasi sumber dengan dilakukan data pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber untuk menguji kredibilitas data penelitian. Triangulasi teknik akan membandingkan data-data dengan hasil wawancara serta observasi. Hasil observasi dikonfirmasi kembali pada narasumber terkait. Sedangkan untuk triangulasi sumber, telah dilakukan *crosscheck* temuan kepada narasumber, dalam hal ini Kepala sekolah, Wakil Kepala sekolah bidang kehumasan, dan sumber-sumber terkait perihal perbedaan data yang diperoleh.

F. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan data menggunakan kalimat untuk memperoleh keterangan

yang jelas dan terperinci. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan induktif dengan menganalisa masalah dari hal – hal yang bersifat khusus kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, dan pendekatan deduktif yaitu menganalisa masalah dari hal – hal yang bersifat umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.

Penulis menggunakan langkah – langkah yang diambil dalam analisis data adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Untuk memperoleh data di lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang ada dapat berupa catatan lapangan mengenai perilaku subjek penelitian.

2. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan , pemusatan perhatian pada penyederhanaan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan – catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data bukanlah suatu hal yang terpisah dari analisis data di lapangan.

3. Penyajian data

Penyajian data dimaksud agar semua data – data yang diperoleh di lapangan yang berupa data hasil observasi wawancara dan dokumentasi

kemudian dianalisa sehingga dapat memunculkan deskripsi tentang penelitian ini.

4. Penarikan kesimpulan / verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hubungan informasi yang tersusun pada suatu bentuk yang dipadu pada penyajian data. Simpulan yang dibuat mengenai peran kepala sekolah dan hubungan kepala sekolah dengan dunia usaha dan industri dalam mengembangkan pendidikan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen serta dampak yang dihasilkan dari kerjasama kepala sekolah dengan dunia usaha dan industri. Untuk keperluan pembandingan terhadap data, penelitian menggunakan dua data teknik triangulasi yaitu :

- a) Triangulasi sumber, yaitu pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data, misalnya memanfaatkan penelitian atau pengamatan lain untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
- b) Triangulasi metode, yaitu membandingkan derajat kepercayaan informasi diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif, misalnya membandingkan data hasil observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, pengawas sekolah, komite sekolah, guru, tata usaha dan karyawan (Moleong, 2001:330-331).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kemajuan dan peningkatan mutu pendidikan SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen tidak bisa terlepas dari peran kepala sekolah. Peran kepala sekolah dalam mengambil kebijakan merupakan kunci keberhasilan kemitraan dengan industri. Namun, peran kepemimpinan dalam menjalin kerjasama dengan lembaga luar sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Berikut simpulan dari penelitian yang telah diperoleh mengenai peran Kepala Sekolah Muhammadiyah dalam bekerjasama dengan dunia industri, diantaranya :

1. Dalam menjalin kerjasama antara SMK Muhammadiyah dengan dunia industri diperlukan suatu kebijakan yang selaras dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak. Penyelarasan kebutuhan dan kemampuan siswa SMK Muhammadiyah dengan kebutuhan dunia industri merupakan kunci suksesnya kemitraan. Kebijakan yang diambil oleh Kepala SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dalam membangun *link and match* dengan dunia industri yaitu dengan selalu mengikuti arah dan langkah yang sejalan dengan dunia kerja atau dunia industri saat ini, dituangkan dalam bentuk MoU, sehingga dapat saling menguntungkan dan akan dievaluasi sebelum batas waktu perpanjangan berakhir.

2. Bentuk kemitraan yang diambil oleh Kepala SMK di Kabupaten Kebumen dengan dunia industri dalam melaksanakan MoU dengan dunia kerja secara totalitas, mulai dari budaya Industri di sekolah, kurikulum yang terintegrasi dengan dunia kerja, sarana praktek standar industri dan penyaluran tamatan, pendidikan dan pelatihan guru, rekrutmen alumni, praktek kerja industri, magang guru, kunjungan industri dan guru tamu.
3. Dalam menjalin kerjasama dengan dunia industri tidak lepas dari permasalahan ataupun hambatan. Hambatan tersebut juga dialami oleh SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen. Beberapa faktor yang menjadi penghambat kerjasama diantaranya; jarak atau lokasi yang jauh dengan Industri, teknologi yang masih kurang, peralatan praktek yang belum memadai, sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah belum sesuai standar dunia industri, dan juga kemampuan sumber daya manusianya yang masih kurang. Selain faktor penghambat, terdapat faktor pendukung kebijakan kepala SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dalam menjalin kemitraan dengan DUDI. Faktor pendukungnya antara lain semangat warga sekolah dalam melaksanakan habit industri sejalan dengan bentuk kerjasama dengan dunia kerja, sumber daya manusia (SDM) yang beragam, adanya saling percaya dan saling menghormati serta menghargai antara sekolah dengan industri, informasi yang terbuka dari industri untuk perkembangan sekolah, dan juga bagi sekolah dapat dijadikan ajang promosi yang menarik

untuk mendapatkan siswa baru. Sudah terbukti adanya beberapa alumni yang dapat bekerja di perusahaan yang sudah menjalin kerjasama dengan sekolah.

B. Saran

Pada penelitian kebijakan Kepala Sekolah dalam menjalin kemitraan dengan dunia usaha dan dunia industri untuk peningkatan mutu di SMK Muhammadiyah Kabupaten Kebumen, peneliti menyarankan beberapa hal untuk kepala SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Mencari kerjasama dengan industri yang berskala nasional atau multinasional.
2. Selalu menggandeng industri dalam meningkatkan mutu pembelajaran, penyelarasan kurikulum, program guru tamu, magang guru, prakerin, maupun mutu lulusan sehingga semua lulusan berkompeten di bidangnya.
3. Tetap jalin komunikasi yang sebanyak-banyaknya dengan dunia usaha dan industri untuk kemajuan sekolah.
4. SMK Muhammadiyah di Kabupaten Kebumen dapat mengembangkan TEFA untuk menunjang kemandirian sekolah dan siswanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amtu, Onisimus. (2015). *Evaluasi Kinerja Kepala Sekolah*. Bandung : Alfabeta
- Arcaro, Jarome S. (2005). *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan* .Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 75
- Asrori, M. (2013). *Pengertian, tujuan dan ruang lingkup strategi pembelajaran*. *Jurnal Pendidikan*.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2009). *Rencana strategi Pendidikan Nasional 2005 -2009, menuju Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang 2025*. Jakarta: Depdiknas
- Fattah, Nanang.(2014). *Analisis Kebijakan Pendidikan*. Bandung : Rosyda karya
- Glover, D and K. Kusterer.(1990). *Small Farmers, Big Business*. London : The Mc Milan Press LTD.
- Hadi, Sutrisno.(2013). *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta : Andi Offset
- Hasbullah .(2015).*Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo.
- Herawan, E. (2015). *Kinerja Kepala Sekolah Sebagai Intructional Leader*. *Pedagogia*, 259–265.
- Ixtiarto, Bambang dan Budi Sutrisno, *Kemitraan Sekolah Menengah Kejuruan Dengan Dunia Usaha Dan Dunia Industri*. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*. Vol 26, No.1, Juni 2016
- Juliantoro, M. (2017). *Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Al-Hikmah*, 5(2), 24–38.
- Kompri.(2017). *Standarisasi Kompetensi Kepala Sekolah Pendekatan Teori untuk Praktik Profesional*. Jakarta : Kencana . 53-54
- Kuncoro, Mudrajad. (2010). *Dasar – dasar Ekonomika Pembangunan, UPP STIM YKPN* Yogyakarta.

- Lincoln, Yuono S, & Egen G Guba, (1985). *Naturalistik Inquiry*, Beverly Hills , Sage Publications.
- Makbuloh, Deden. (2016). *Pendidikan Islam dan Sistem Penjaminan Mutu*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Moleong, Lexy J.(2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Musfah, Jejen. (2015). *Manajemen Pendidikan, Teori, kebijakan dan praktek*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Pongtuluran, Aris. (1995). *Kebijakan Organisasi dan Pengambilan Keputusan Manajerial*. Jakarta : LPMP
- Prawirosentono, Suyadi.(2004). *Filosofi Tentang Manajemen Mutu Terpadu Total Quality Management Abad 21 Studi Kasus dan Analisis* Jakarta: Bumi Aksara, 5.
- Prasetyo, Alif Sukma. Nunuk Hariyati. Strategi Kepala Sekolah Membangun Kemitraan Dengan Dunia Usaha/Dunia Industri Dalam Peningkatan Keterserapan Lulusan Siswa Smk. *Jurnal Inspirasi Manajemen Pendidikan* Volume 09 Nomor 02 Tahun 2021, 475-488
- Priansa, Donni Juni. (2020). *Manajemen Kinerja Sekolah*. Bandung : Pustaka Setia
- Rohmah,Noer dan Zainal Fanani.(2017), *Pengantar Manajemen Pendidikan* Malang: Madani, 205.)
- Sagala, Syaiful.(2017). *Manajemen stratejik dalam Pengelolaan Mutu Pendidikan*. Bandung : Alfabet
- Sarjono, dkk.(2008). *Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam*. Yogyakarta : Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga.
- Satori, Djam'an.(2016). *Pengawasan dan Penjaminan Mutu Pendidikan*. Bandung : Penerbit Alfabeta
- Soetomo.(2009). *Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunhaji. (2014). *Kualitas Sumber Daya Manusia (Kualifikasi, Kompetensi dan Sertifikasi Guru)*. *Jurnal Kependidikan*, II(1), 142–160.

- Tilaar, H. A. R. (2002). *Membenahi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (1992). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tilaar, H. A. R. (2002). *Membenahi Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tilaar, H. A. R. (2006). *Standarisasi Pendidikan Nasional (Suatu Tinjauan Kritis)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Timor, H., Saud, U. S., & Suhardan, D. S. (2018). Mutu Sekolah: Antara Kepemimpinan Kepala sekolah Dan Kinerja Guru. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXV(1), 21–30.